

LAPORAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA *MICROSITE* SEMESTER I TAHUN 2022



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah unit kerja eselon II yang berada di dalam Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan fungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya memanfaatkan media teknologi informasi (IT), baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun pelayanan kepada peserta kegiatan.

Upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan dan memberikan pelayanan kepada peserta, salah satunya diwujudkan melalui media *microsite pusdik.mkri.id*. Selain menjadi sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada peserta, *microsite* merupakan salah satu media Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyampaikan informasi publik.

Dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, Mahkamah Konstitusi menyediakan berbagai informasi terkait kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui *microsite*. Masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan berkunjung ke dalam *microsite pusdik.mkri.id*.

Laporan statistik kunjungan *microsite* ini dibuat dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kami berharap laporan statistik kunjungan *microsite* yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi program dan kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, khususnya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Bogor, Agustus 2022

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Nanang Subekti



Digital Signature
mk1096588339220802085619

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), menjalankan salah satu fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

Sebagai salah satu unit kerja di Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Dalam rangka mendukung penguatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konstitusional warga negara, maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, baik berupa perangkat lunak berupa substansi pendidikan, maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung program dan kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada era revolusi industri 4.0 dimana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam keseharian masyarakat, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya memanfaatkan media teknologi informasi (IT) secara berkelanjutan, baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun pelayanan kepada peserta kegiatan. Hal yang demikian salah satunya diwujudkan melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). SIMULTAN terdiri atas *microsite pusdik.mkri.id* yang terintegrasi dengan sistem informasi *epusdik.mkri.id* (*epusdik*).

Selain menjadi sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada peserta, *microsite pusdik.mkri.id* merupakan salah satu sarana pendukung keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait kegiatan atau aktivitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Penyelenggara mengunggah beberapa dokumen terkait kegiatan ke dalam *epusdik*, kemudian peserta dapat mengaksesnya melalui sistem informasi peserta yang ada di dalam *microsite pusdik.mkri.id*.

B. Dasar Hukum

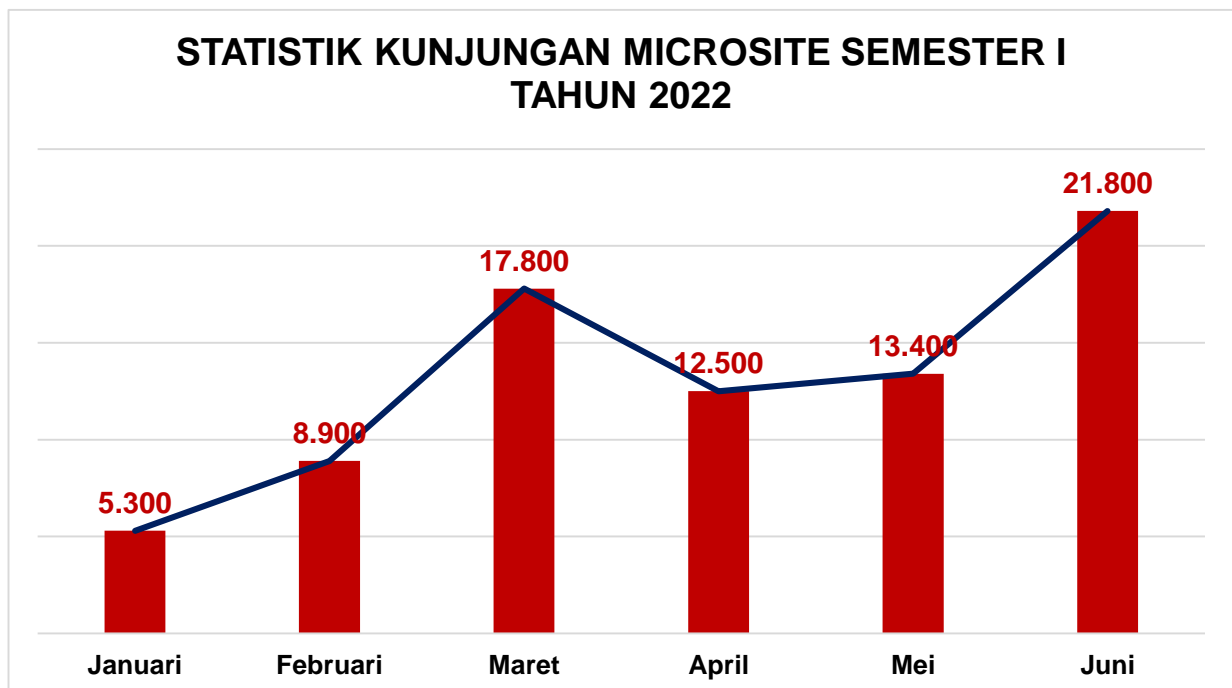
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C);
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. Statistik Kunjungan *Microsite*

Microsite pusdik.mkri.id merupakan salah satu media Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyampaikan informasi publik. Dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, Mahkamah Konstitusi menyediakan berbagai informasi terkait kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui *microsite*. Masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan berkunjung ke dalam *microsite pusdik.mkri.id*.

Berikut kami sampaikan laporan kunjungan *microsite pusdik.mkri.id* sepanjang bulan Januari s.d. Juni tahun 2022:



Berdasarkan grafik statistik di atas, dapat diketahui bahwa total kunjungan *microsite* sepanjang semester I tahun 2022 berjumlah 79.700 kunjungan. Rata-rata kunjungan per bulannya adalah 13.283 kali. Jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Juni 2022 dengan 21.800 kunjungan, sedangkan kunjungan terendah ada pada bulan Januari 2022 yaitu hanya 5.300 kunjungan.

Jumlah kunjungan *microsite* mengalami tren kenaikan pada triwulan I tahun 2022, dimana pada bulan Januari dan Februari belum ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sehingga jumlah kunjungan pun rendah. Jumlah kunjungan terendah ada pada bulan Januari dengan 5.300 kunjungan. Kegiatan pada tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Maret dengan 2 (dua) kegiatan. Hal ini membuat jumlah kunjungan meningkat hingga 2 (dua) kali lipat dibandingkan bulan Februari.

Sementara itu, pada bulan April dan Mei 2022 tidak ada lagi kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sehingga jumlah kunjungan menurun, kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April yaitu Halaqah Konstitusi.

Kegiatan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada minggu ke-2 bulan Mei dan Juni 2022 yang dilaksanakan hampir setiap minggunya. Hal ini berdampak pada jumlah kunjungan *microsite* yang tinggi sepanjang semester I tahun 2022. Mayoritas pengunjung *microsite* merupakan peserta yang mengakses *microsite* untuk kepentingan kegiatan, seperti mengerjakan *pre-test & post-test*, mengunduh materi kegiatan, melakukan presensi pada tiap sesi materi, mengisi kuesioner evaluasi, hingga mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

D. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara kontinu menyebarkan informasi publik melalui *microsite pusdik.mkri.id*. Berikut ini rekapitulasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama periode bulan Januari s.d. Juni Tahun 2022:

Bulan	Konten	Tanggal Publikasi	Keterangan
Januari	Laporan Studi Komparasi BBPPMPV BOE Malang	4 Januari 2022	Laporan Studi Komparasi ke Unit Kerja Peraih WBBM Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika
Februari	Laporan Survei kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Semester II Tahun 2021	18 Februari 2022	

Maret	Berita tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Guru Penggerak Angkatan I	18 Maret 2022	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Guru Penggerak Angkatan I pada tanggal 14 s.d. 17 Maret 2022
	Laporan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Guru Penggerak Angkatan I	30 Maret 2022	
April	Berita tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Guru Penggerak Angkatan II	8 April 2022	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Guru Penggerak Angkatan II pada tanggal 28 s.d. 31 Maret 2022
	Laporan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Guru Penggerak Angkatan II	13 April 2022	
Mei	Laporan Survei kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Triwulan I Tahun 2022	27 Mei 2022	
Juni	Laporan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota KAHMI	14 Juni 2022	
	Berita tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah	27 Juni 2022	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022
	Berita tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI	27 Juni 2022	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI pada tanggal 13 s.d. 16 Juni 2022

Juni	Berita tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota AAKI	27 Juni 2022	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Pengurus dan Anggota AAKI pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022
------	---	--------------	--

E. Penutup

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan upaya pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam pelayanan pendukung penyelenggaraan kegiatan maupun pelayanan kepada peserta. Penerapan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang merupakan integrasi antara *microsite pusdik.mkri.id* serta sistem informasi *epusdik.mkri.id*.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi, pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan *update* konten informasi publik yang ada pada *microsite pusdik.mkri.id*. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini peserta kegiatan, serta meningkatkan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Akhir kata, laporan keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama penerapan keterbukaan informasi publik.